Visi, Misi dan Program

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

H. Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming Raka

"Impian kami semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak,

... semua anak-anak bangsa kita bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar,

... semua kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau,

... semua petani bisa tersenyum karena harga jual produk mereka bagus,

... semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup,

... semua guru tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah,

... polisi, jaksa, prajurit berjuang dengan gaji yang layak dan keadaan hidup yang baik,

... semua pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit."

Visi
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8	17	8
Misi Asta Cita	Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Daftar Isi

Pengantar Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden

Saudara-saudara sekalian,

Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang:

1. **Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia**
2. **Memajukan kesejahteraan umum**
3. **Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan**
4. **Ikut melaksanakan ketertiban dunia.**

Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Pembangunan yang dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencita-citakan tercapainya "Indonesia Emas" di atau sebelum tahun 2045.

Adapun intisari target RPJPN 2025-2045 adalah:

1. **Pendapatan per kapita setara negara maju.**
2. **Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.**
3. **Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.**
4. **Daya saing sumber daya manusia meningkat.**
5. **Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emissions* (nol emisi GRK)**

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila.

Ini semua harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.

Atas dasar-dasar pemikiran di atas, bersama ini kami sampaikan Visi, 8 Misi (Asta Cita), 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas serta Program Kerja ke hadapan rakyat Indonesia di Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.

Kebersamaan adalah hal yang mutlak untuk keberhasilan program yang dipaparkan dalam dokumen ini. Untuk itu saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk kerja bersama, secara gotong royong.

Bersama terus maju, Bersama Indonesia Maju.

Prabowo Subianto
Calon Presiden 2024-2029

Gibran Rakabuming Raka
Calon Wakil Presiden 2024-2029

Visi

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8
Misi Asta Cita

17
Program Prioritas

8
Program Hasil Terbaik Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila

Prabowo dan Gibran percaya pada prinsip Ekonomi Pancasila. Ini adalah paham ekonomi yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.

Paham ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk masyarakat yang paling lemah.

Paham Ekonomi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Ekonomi yang religius dan Wujudkan persatuan nasional**
2. **Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan**
3. **Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional**
4. **Ekonomi yang egaliter (sederajat) dan kerakyatan**
5. **Ekonomi yang berkeadilan sosial**

8
Misi
Asta Cita

17
Program
Prioritas

8
Program
Hasil Terbaik
Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

**Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia**

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Tantangan Strategis Bangsa Indonesia 2024-2029

Presiden Joko Widodo menyampaikan pada 7 Oktober 2023: **"Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, perubahan iklim, krisis pangan."**

Karena itu, dalam menyusun visi, misi, dan program periode 2024-2029, Prabowo dan Gibran mempertimbangkan tantangan strategis yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia.

Berikut adalah daftar tantangan strategis yang harus kita hadapi 5 tahun ke depan dan implikasinya:

Tantangan Strategis	Penjelasan dan Implikasi
Perubahan Iklim	September 2023 adalah September terpanas dalam catatan sejarah bumi. Perubahan iklim bisa menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa.
Konflik Bersenjata di Ukraina dan Palestina	Konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global.

Tantangan Strategis	Penjelasan dan Implikasi
Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara	Rivalitas antara dua negara adikuasa atas Taiwan bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati Arus Lintas Laut Indonesia (mis. Selat Malaka) dan Laut Natuna Utara.
Perlambatan Ekonomi Global	Pelemahan ekonomi dan kemungkinan resesi negara-negara maju menekan laju permintaan produk ekspor Indonesia dan meningkatkan suku bunga acuan, sehingga memberikan tekanan pada Rupiah.
Disrupsi Kecerdasan Buatan	Cepatnya kemajuan kecerdasan buatan dapat mengubah kebutuhan talenta di hampir semua industri dan memaksa peningkatan kemampuan tenaga kerja secara cepat.

Tantangan Strategis	Penjelasan dan Implikasi
Ancaman Pandemi Baru	Meningkatnya suhu bumi membuka kemungkinan aktifnya kembali virus-virus dari masa lalu, yang dapat menyebabkan merebaknya pandemi baru untuk manusia, hewan, atau tumbuhan.
Terbatasnya Waktu Bonus Demografi	Indonesia diprediksi hanya punya 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (*middle income trap*) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya.
Meningkatnya Populasi	Dibutuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di 2050, dengan kebutuhan luas lahan tambahan setara 2x dari luas negara India. Pemenuhan pangan untuk semua akan sangat menantang.

8
Misi Asta Cita

17
Program Prioritas

8
Program Hasil Terbaik Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Fondasi Indonesia Maju

Prabowo dan Gibran membangun Visi Bersama Indonesia Maju dengan dasar fondasi ekonomi, sosial, dan politik yang kuat, yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin Negara Indonesia sebelumnya sebagai berikut:

Indikator Capaian	Capaian Era Presiden Joko Widodo
PDB Nominal	**US$ 1,4 triliun** tertinggi sepanjang sejarah
GNI per Kapita	**US$ 4.580** tertinggi sepanjang sejarah
Jumlah Penduduk Miskin	**9,57%** terendah sepanjang sejarah
Neraca Dagang	**Surplus US$ 54,4 miliar** tertinggi sepanjang sejarah
Cadangan Devisa	**US$ 137 miliar** tertinggi sepanjang sejarah
Pertumbuhan Ekonomi	**5,2% (Q2 2023)** kedua tertinggi di G20
Tingkat Inflasi	**3,3%** salah satu terendah di G20
Utang Pemerintah	**38% dari PDB** salah satu terendah di G20
Nilai Tukar Rupiah	**Menguat 2,1% (YTD Agustus 2023)** keempat terbaik di G20

Seluruh capaian menggunakan angka 2022, kecuali disebutkan lain

Indikator Capaian	Capaian Era Presiden Joko Widodo
Nilai Ekspor Produk Turunan Nikel	**US$ 34,2 miliar (2023)** tertinggi sepanjang sejarah, naik 11,7x dari angka 2014 di US$ 2,9 miliar
Realisasi PMA di Luar Jawa	**58% (2022)** tertinggi sepanjang sejarah
Besar Belanja APBN	**Rp. 3.325 triliun (2024)** tertinggi sepanjang sejarah
Program Jaring Pengaman Sosial	**Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN / KIS)** • 96,8 juta orang gratis BPJS • 236 juta layanan kesehatan gratis (2022) **Kartu Indonesia Pintar (KIS)** • Dukungan 17,9 juta siswa + 2,2 juta siswa sekolah agama • Dukungan 908 ribu mahasiswa + 67,8 ribu mahasiswa agama **Kartu Sembako (BPNT)** • 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat **Program Keluarga Harapan (PKH)** • 10 juta Keluarga Penerima Manfaat
Pembangunan Infrastruktur	**Telah terbangun:** • > 320.000 km jalan desa • > 2.000 km jalan tol • > 1,7 juta meter jembatan • Pelabuhan, bandara baru, dan infrastruktur kunci lainnya

Atas capaian-capaian di atas, Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo mendapat tingkat kepuasan 82% yang merupakan tingkat kepuasan tertinggi terhadap Pemerintah di negara G20. Ini adalah fondasi solid pembangunan ke depan.

Selain capaian Presiden Joko Widodo dan para Pemimpin Bangsa Indonesia, Prabowo dan Gibran juga membangun Visi Bersama Indonesia Maju berlandaskan potensi Bangsa dan Negara Indonesia sebagai berikut:

Indikator	Modal Potensi Indonesia Maju
Cadangan Sumber Daya Alam	• **Cadangan Nikel terbesar di dunia** • **Cadangan Timah terbesar ke-2 dunia** • **Cadangan Bauksit terbesar ke-6 dunia** • **Cadangan Tembaga terbesar ke-7 dunia** • **Potensi EBT 437 GW** • **Potensi produksi perikanan tangkap lestari 12 juta ton per tahun** • **Potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun**
Sumber Daya Manusia	• **Populasi nomor 4 dunia dengan usia median 29 tahun**
Lokasi strategis	• **45% perdagangan dunia melalui laut Indonesia** • **Lajur laut utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania**
Produksi Unggulan	• **Produsen kelapa sawit no-1 dunia** • **Produsen perikanan tangkap no-2 dunia**

Visi
**Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

8 Misi Asta Cita	17 Program Prioritas	8 Program Hasil Terbaik Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Visi Presiden dan Wakil Presiden

Karena hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan kita bisa berhasil sebagai negara dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas, maka visi Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran adalah:

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Bersama	**Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama**
Indonesia Maju	**Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo**
Menuju	**Dengan tujuan yang jelas, yaitu**
Indonesia Emas	**Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat**

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
3. **Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
5. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

8 Program Hasil Terbaik Cepat

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden:

1

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.

Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
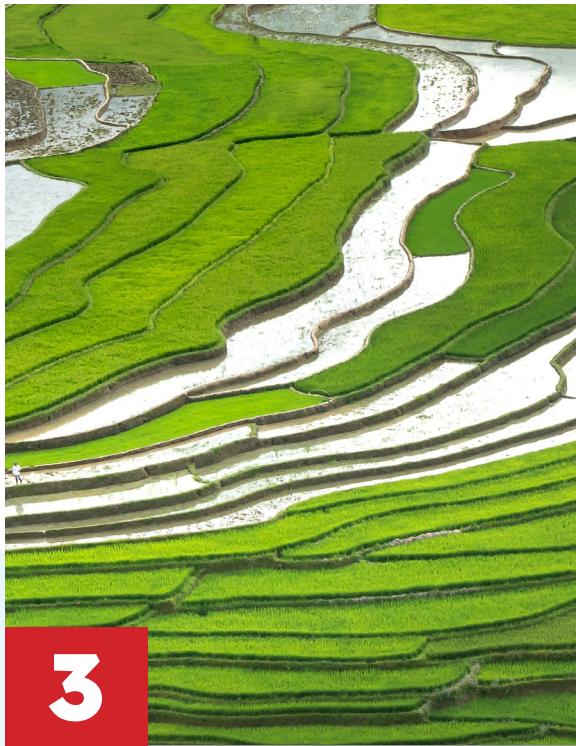
Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi.

Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.

Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (*non-boarding school*) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.

Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara

layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

17 Program Prioritas

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan program prioritas sebagai berikut:

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama.

Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai.

Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

Penyempurnaan sistem penerimaan negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara.

Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari **kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa** agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik.

Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. **Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.**

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberatasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.

Pemberantasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.

Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. **Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.**

Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.

Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat

10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara.

Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi.

11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.

Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. **Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.**

Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida.

Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. **Penguatan program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda.**

Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan.

Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia.

Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. **Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan.**

Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional.

Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja **baru** dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Pancasila adalah pemersatu bangsa, ideologi dan falsafah bangsa yang harus kita jaga ke depan" Prabowo Subianto

Program Kerja

Asta Cita 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial.

Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara.

Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Pelengkap dari kedua prinsip tersebut adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu.

Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif.

Kami, Prabowo dan Gibran memiliki komitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM, dengan cara:

Memperkokoh Ideologi Pancasila

1. Menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme
3. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*).

Penguatan Demokrasi

4. Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
5. Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.
6. Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.

Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia)

7. Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
8. Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.
10. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
11. Memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

Program Kerja

Asta Cita 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementera itu Kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Khusus untuk kemandirian banga, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat.

Atas dasar hal tersebut, Kami, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif dengan berlandaskan ekonomi hijau dan ekonomi biru, melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata TNI.
2. Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri.

3. Memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat Komponen Cadangan.
4. Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme.
5. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.
6. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI.
7. Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.
8. Memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
9. Memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar.
10. Meningkatkan profesionalisme pengadaan, kemampuan transfer teknologi, profesionalisme prajurit dengan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.
11. Memastikan frekuensi publik dimanfaatkan sebagai akses informasi yang objektif dan kredibel untuk meningkatkan kesatuan antar warga.
12. Mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional.
13. Menjalankan strategi *smart diplomacy* dalam menjamin kebutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
14. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.
15. Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
16. Memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan KBRI di Palestina.

17. Melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi.

18. Memantapkan supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas-aktif.

Swasembada Pangan

19. Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan., dan kelautan.

20. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

21. Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen.

22. Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

23. Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.

24. Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.

25. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

26. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio.

27. Menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio.

28. Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.
29. Memperkuat program program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
30. Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
31. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
32. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.
33. Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha.
34. Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.
35. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
36. Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (*marine aquaculture*) dan perikanan budidaya pantai (*coastal aquaculture*) serta perikanan laut dalam (deep see fishing).

Swasembada Air

37. Menjaga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah dengan memperkuat kapabilitas BUMN dan BUMD dalam pengelolaannya.

38. Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat.

39. Memberikan bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air.

40. Meningkatkan kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) minimal setara dengan produk air mineral.

41. Melaksanakan pipanisasi air bersih.

42. Melakukan pembersihan sungai-sungai.

43. Meningkatkan program resapan air dan membangun embung-embung air sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau.

Swasembada Energi

44. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*).

45. Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.

46. Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

47. Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

48. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.

49. Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.

50. Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau dan/atau ekonomi biru.

Ekonomi Hijau

51. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.
52. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa.
53. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
54. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
55. Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.
56. Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya.
57. Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah.
58. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi-pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.
59. Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.
60. Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target *net zero emission*.
61. Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.

62. Melanjutkan program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
63. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit.
64. Mengembangkan bioetanol dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula.
65. Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi.

Ekonomi Biru

66. Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
67. Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya.
68. Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.
69. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau.
70. Pengembangan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
71. Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik.
72. Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan, dan teknik pengendalian penyakit.
73. Meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan kemaritiman.
74. Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.
75. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.

76. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
77. Mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut. Memastikan sarana dan prasarana tersedia bagi nelayan dan pembudidaya perikanan untuk memperbaiki produktivitas dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
78. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*.
79. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
80. Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.

“Lokananta usai direvitalisasi bisa menjadi destinasi wisata musik di Indonesia.”

Gibran

Program Kerja

Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak.

Salah satunya mendorong generasi muda perlu masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang.

Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.

Melalui strategi terintegrasi ini, kita bergerak menuju sebuah masa depan yang lebih memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk memastikan lapangan kerja yang berkualitas hadir untuk masyarakat luas, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan cara:

Mendorong Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas

1. Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.
2. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.

3. Memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri.
4. Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM.
5. Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.
6. Mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi).
8. Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus birokrasi dan regulasi yang menghambat serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula.

Mendorong Industri Kreatif

9. Meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembangan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi.
10. Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.
11. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.
12. Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
13. Menjadikan BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM.
14. Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan

penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya.

15. Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.
16. Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuannya untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global, yang akan dicapai dengan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya, termasuk juga memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan.
17. Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital, industri kreatif, dan seni budaya.
18. Menguatkan BUMN dan swasta nasional yang berbisnis maupun memiliki jasa di industri syariah dan pariwisata.
19. Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.
20. Memperbaiki manajemen promosi pariwisata Indonesia.
21. Menguatkan ekosistem industri halal dan memberikan insentif yang diperlukan.
22. Menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
23. Mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

24. Melanjutkan dan memperluas pembangunan jalur irigasi dan bendungan untuk air baku, pencegahan banjir, dan irigasi.
25. Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah.
26. Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.

27. Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
28. Mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.
29. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.

“Pertahanan sebuah negara di abad 21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi” Prabowo Subianto

Program Kerja

Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan setiap warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, kita membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang.

Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, inovasi dalam sains dan teknologi, serta peningkatan kesehatan publik.

Salah satu tujuannya adalah menghadirkan prestasi di bidang olahraga yang tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga mencerminkan ketangguhan, spirit, dan dedikasi bangsa.

Di samping itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas menegaskan tekad kita dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang diberi peluang yang sama untuk berkembang dan meraih keunggulan. Setiap aspek ini bersatu, menciptakan gambaran dari visi bangsa yang berkembang, berkeadilan, dan berbudaya.

Kami, Prabowo & Gibran mempunyai komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusi terhadap perempuan, usia muda, dan penyandang disabilitas, melalui:

Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi.
2. Memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk program beasiswa dan peningkatan kapabilitas SDM di bidang pendidikan ke pesantren dan LSM.

3. Meluncurkan program Dana Abadi Pesantren sebagai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
4. Membentuk lembaga pengelola Dana Abadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung kualitas demokrasi.
5. Memperbesar alokasi anggaran dan memperluas program pertukaran budaya di tingkat internasional dalam rangka semakin menguatkan jaringan, kolaborasi wawasan, kapasitas, dan keterampilan para pekerja seni.
6. Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa *entrepreneurship*.
7. Memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.
8. Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja yang bersertifikasi.
10. Melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing.

Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

11. Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memperjuangkan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*).
12. Menambahkan Kartu Anak Sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai penanggulangan *stunting*.
13. Mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu).
14. Memperkuat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular (TBC, HIV, dll) dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dll).
15. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

16. Memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap. Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.

17. Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.

18. Memastikan ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

19. Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro-rakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan pro-pengadaan farmasi.

20. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi Posyandu (pos pelayanan terpadu), revitalisasi Posbindu (pos pembinaan terpadu), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), Poskesdes (pos kesehatan desa), dan Poskestren (pos kesehatan pesantren).

21. Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).

22. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia dan mencapai bonus demografi.

23. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk.

24. Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi

25. Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi.

26. Penguatan sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global.

27. Membenahi kurikulum Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi dan Politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri.
28. Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.
29. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh, untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3.
30. Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi masyarakat.
31. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.
32. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis, melakukan revitalisasi balai-balai latihan kerja.
33. Memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan.
34. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan memberikan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional.
35. Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.
36. Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standarisasi kualitas, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi.
37. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini.
38. Mendorong perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan dan berkolaborasi dengan dunia usaha.
39. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan delapan karakter utama bangsa seperti religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.
40. Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional.

41. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.
42. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitikberatkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global
43. Membangun lebih banyak ruang pameran dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman-seniwati Indonesia.
44. Meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.

Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

45. Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
46. Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.
47. Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.
48. Memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.
49. Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.
50. Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
51. Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.
52. Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

Meningkatkan Prestasi Olahraga

53. Mendorong gerakan untuk menggiatkan olahraga masyarakat dan menghidupkan kompetisi olahraga antardesa, antar sekolah, dan antarinstansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat.
54. Memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi kompetisi olahraga dan kesenian.
55. Membangun ribuan lapangan sepak bola dan infrastruktur olahraga yang dikelola dengan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) sehingga lebih besar manfaatnya bagi komunitas olahraga lokal.
56. Memberikan keringanan pajak bagi klub-klub olahraga.
57. Memberikan jaminan hari tua bagi atlet yang berprestasi di tingkat dunia.
58. Mewajibkan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri untuk memberikan beasiswa kepada atlet, minimal 5 persen dari total daya tampung.
59. Meningkatkan dukungan dalam bentuk infrastruktur dan finansial di dunia olahraga demi peningkatan prestasi kontingen Indonesia di ajang bergengsi seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.
60. Menyusun program *scouting* terstruktur dan berjenjang yang dilakukan sejak level sekolah dasar.

Program Kerja

Asta Cita 5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat.

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional.

Misi ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Kami, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi melalui berbagai program dan rencana:

Mengembangkan Hilirisasi untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

1. Melakukan pendalaman hilirisasi dan industrialisasi dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Membangun infrastruktur secara berkeadilan, dengan mengutamakan akses terhadap kawasan industri, lahan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
3. Pembangunan kembali industri rakyat, dasar, dan strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

4. Meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri-industri komoditas yang mendorong hilirisasi.

5. Melanjutkan program industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor melalui pembangunan pabrik, *smelter*, dll.

6. Mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (*innovative financing*) untuk menarik investasi ke dalam negeri sebagai bagian dari program industrialisasi dan hilirisasi.

Melanjutkan Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi

7. Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.

8. Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang.

9. Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.

10. Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transhipment hub*) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.

Program Kerja

Asta Cita 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa, salah satunya dipengaruhi oleh keseimbangan pengembangan yang konkret di setiap wilayah, yang dimulai dari komunitas desa.

Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, kita menghargai peran esensial komunitas desa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya.

Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah kita berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Hal ini akan mencerminkan dedikasi bangsa dalam memastikan sebuah masa depan yang lebih baik dan setara bagi setiap anggota masyarakat.

Karena itu Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan dengan membangun dari desa dan daerah, dengan cara:

Membangun Desa dan Membangun dari Desa

1. Melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.
2. Memastikan agar hasil kekayaan Indonesia bisa digunakan kembali untuk membangun Indonesia.
3. Memperbaiki sistem tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di desa.
4. Menambah cakupan transfer dana daerah ke kelurahan dengan penambahan program Dana Kelurahan.

Pemerataan Ekonomi

5. MKebijakan subsidi yang efektif dalam mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan yang menjadikan harga terjangkau dan terkendali.
6. Melanjutkan program subsidi energi (subsidi BBM, LPG, listrik) yang tepat guna untuk masyarakat yang membutuhkan.
7. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tarif listrik dan harga BBM, serta mengendalikan pengenaan pajak.
8. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal.
9. Meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
10. Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat.
11. Memperkuat dan memperluas program pembiayaan UMKM melalui holding pembiayaan ultra mikro seperti program PNM Mekaar.
12. Melanjutkan penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.
13. Melanjutkan penataan desentralisasi administrasi dan keuangan daerah.
14. Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan.

Memberantas Kemiskinan

15. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT).
16. Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
18. Mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.
19. Menjamin akses akan air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil.
20. Membina dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, serta mengembangkan program asistensi sosial lanjut usia (ASLUT).
21. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.

“Mau tidak mau kalau Indonesia mau merdeka dan makmur, menjadi negara maju, kita harus punya TNI yang sangat kuat”

Prabowo Subianto

Program Kerja

Asta Cita 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi.

Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba.

Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi dan narkoba harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.

Sebagai respons terhadap dinamika dan evolusi suatu bangsa, struktur pemerintahan harus senantiasa dinamis dan berinovasi untuk tetap sesuai dengan aspirasi rakyat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjamin kondisi yang mendukung perkembangan serta kemajuan bangsa dalam berbagai bidang.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk mereformasi sistem politik, hukum, serta birokrasi guna mencegah dan memberantas korupsi dan penggunaan narkoba, dengan cara:

Reformasi Politik

1. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
2. Membangun *Single Identity Number* (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan NIK Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Pemilu.

3. Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.

Reformasi Hukum

5. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
6. Menjadikan KPK sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
7. Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah, di antaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.
8. Meninjau kembali peraturan tentang zona hunian tempat tinggal perkotaan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan.
9. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja.
10. Menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
11. Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
12. Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuhan.

13. Melakukan revitalisasi fungsi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat *bankable* dan pembayaran non-tunai.

14. Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong *ease of doing business*, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.

15. Melakukan revisi jaminan pensiun PP Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.

16. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek *online* dan taksi *online* yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, serta hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan hukum.

17. Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

18. Memperbaiki sistem *outsourcing* sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

19. Memastikan tata kelola Migas dan Pertambangan Nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.

20. Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.

21. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

22. Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap atau bekerja di luar negeri.

23. Memperluas dan memperkuat penggunaan *e-catalogue* dan *e-procurement* di pemerintahan dan BUMN.

24. Mendorong kewajiban pengadaan barang dan jasa melalui sistem dan pipeline yang sudah dirumuskan LKPP (30-40% APBN untuk pengadaan barang dan modal), serta mengintegrasikan sistem belanja modal dan barang tersebut ke dalam *e-planning hingga e-monitoring, e-budgeting hingga e-catalog, dan e-vendor.*

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

25. Meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas.
26. Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial.
27. Mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru.
28. Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (*tax ratio*).
29. Mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.
30. Menghentikan praktik manipulasi (*misinvoicing*) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (*smelter*, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya).
31. Memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional, serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal.
32. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
33. Pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi.
34. Ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.
35. Memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

36. Memperbaiki produktivitas perekonomian dengan tujuan memperbaiki angka ICOR (*Incremental Capital to Output Ratio*).
37. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif.
38. Meningkatkan harmonisasi kebijakan sektor moneter (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), sektor fiskal, dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.
39. Menguatkan manajemen BUMN yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.
40. Membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain.
41. Membangun *database* aset dan kekayaan kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah, serta peta potensi kekayaan SDA.
42. Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft* kompetensi ASN maupun APH.
43. Menegakkan kembali sistem meritokrasi dalam penunjukan pimpinan nasional seperti pejabat di kementerian, lembaga setingkat kementerian, TNI, POLRI, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
44. Membangun paradigma bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
45. Menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN.
46. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara.
47. Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antardaerah.
48. Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
49. Mengembangkan sistem *smart government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
50. Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik, langsung dari lembaga pendidikan dan menyediakan area karier baru bagi pensiunan ASN yang masih ingin berkarya di luar pemerintahan.

“Sekarang adalah momen yang baik bagi UMKM kebudayaan Indonesia menembus pasar dunia” Gibran

Program Kerja

Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa yang besar.

Toleransi antarumat beragama bukan hanya menjadi semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, memastikan setiap warga negara merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya dalam menjalankan ibadah.

Alam yang makmur juga harus dijaga untuk memberikan keberlanjutan pembangunan. Budaya yang kuat dan bermartabat membuat ciri khas Indonesia tidak luntur sebagai bangsa yang besar.

Dengan pendekatan holistik ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih cerah.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan keamanan untuk beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya, dengan cara:

Masyarakat Adil, Makmur dan Harmonis

1. Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang ber-Kebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak-bangsa.
2. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
3. Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar elemen masyarakat sejak dini.

4. Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal.
5. Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya.
6. Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

Melestarikan Budaya

8. Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.
9. Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat yang hampir hilang dan asing bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.
10. Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia
11. Revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda.
12. Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia.
13. Memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya.
14. Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.
15. Melengkapi dan pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.

16. Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan BUMN.
17. Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.
18. Melengkapi dan memodernisasi tata kelembagaan dalam program nasional perlindungan warisan budaya (*cultural heritage*) baik yang bersifat *intangible* (tak benda) seperti cerita-cerita tradisional (*folklore*), bahasa ibu, peribahasa lokal, kearifan lokal dan lagu tradisional, dan tangible (berwujud) seperti motif batik, seni ukir, alat musik, keris, prasasti, tugu kerajaan, candi serta keraton, dan istana.
19. Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional Indonesia agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia.
20. Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.
21. Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.
22. Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.

Penanganan Bencana

23. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.
24. Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
25. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
26. Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.

27. Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.
28. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

Partai Politik Pengusung

Koalisi Indonesia Maju pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran terdiri dari partai politik berikut:

PARTAI GERINDRA

PARTAI GOLONGAN KARYA

PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI GELORA INDONESIA

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PARTAI PRIMA
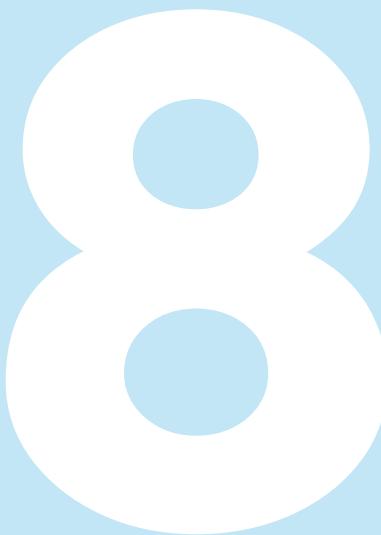
Prabowo Subianto, lahir 17 Oktober 1951

8 Fakta Prabowo Subianto

Profil Calon Presiden

1 Di 1996, Prabowo selamatkan 20 sandera (8 WNA) dari OPM di Mapenduma, Papua.

2 Di 1997, Prabowo pimpin tim Indonesia yang jadi pendaki Muslim pertama capai puncak Everest.

3 Sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Prabowo pastikan prestasi timnas pencak silat gemilang.

4 Prabowo dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang sejahterakan petani.

5 Prabowo juga adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang bela pedagang pasar.

6 Prabowo membina Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang perjuangkan harkat petani nelayan.

7 Prabowo adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, partai kedua terbesar di Indonesia di Pemilu 2019

8 Prabowo diakui dunia internasional sebagai tokoh persatuan Indonesia yang memiliki wawasan strategi kedaulatan bangsa.

Prestasi **Prabowo** Sebagai Menteri Pertahanan Sejak 2019

Prestasi Calon Presiden

1. Menhan Prabowo berhasil buat Indonesia punya komponen cadangan (KOMCAD)
2. Menhan Prabowo perkuat industri pertahanan dalam negeri, perkuat PINDAD dan wujudkan produksi MAUNG (kendaraan taktis) di Bandung
3. Menhan Prabowo perbaiki dan tingkatkan kualitas SMA Taruna Nusantara, membangun 5 (lima) sekolah baru di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan membangun 2 politeknik baru
4. Menhan Prabowo buka 4 fakultas baru, perbaiki kampus dan bangun Politeknik Universitas Pertahanan (UNHAN) di Atambua, NTT
5. Menhan Prabowo bentuk Satgas Air yang temukan 100+ sumber air untuk atasi kekeringan di berbagai daerah
6. Menhan Prabowo bangun 25 RS TNI baru, perbaiki Pusrehab Kemhan jadi RS Jend. Sudirman berfasilitas lengkap, dan perkuat industri alkes dalam negeri
7. Menhan Prabowo dapatkan alutsista terbaik seperti pesawat tempur F 15-EX dan Rafale untuk TNI AU, kapal selam untuk TNI AL
8. Menhan Prabowo tampil memukau di forum-forum internasional dan buat Indonesia disegani

Tanda Kemampuan dan Penghargaan Prabowo

Brevet Kualifikasi
Komando Kpassus

Brevet Free Fall
TNI AD

Brevet Free Fall
US Army

Brevet Penerbang
TNI AD

Brevet
Jump Master

Brevet Sat-81
Anti Terror

Brevet Pandu Udara
US Army

Brevet GSG9
Germany

TANDA JASA PRABOWO

- Bintang Kartika Eka Paksi Naraya
- Bintang Yudha Dharma Naraya
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- Satya Lencana Seroja Ulangan III
- Satya Lencana Raksaka Dharma
- Satya Lencana Dwija Sistha
- Satya Lencana Wira Karya
- Paladin Medal of Honor (Kamboja)
- Commandeur de l'Ordre National du Mérite (Perancis)

Gibran Rakabuming Raka, lahir 1 Oktober 1987

Calon Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka

Solo di Bawah Kepemimpinan Gibran

1. **Solo dinobatkan sebagai kota ternyaman di Indonesia:** Dalam penilaian yang dilakukan oleh situs akademi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada 2022. Kota Solo meraih peringkat partama kota ternyaman di Indonesia dengan poin rata-rata sebesar 77.
2. **Solo memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah:** Pertumbuhan ekonomi Solo melejit hingga 6,25 persen pada tahun 2023 jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya 5,31 persen.
3. **Solo menjadi kota dengan peringkat ke-4 tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022:** Kota Solo terus menunjukkan tren positif sebagai kota toleran akibat kebijakan pemberian ruang untuk merayakan hari besar keagamaan di kawasan Balai Kota Solo.
4. **Kawasan kumuh Solo berkurang 70% dalam 4 tahun:** Luasan kawasan kumuh di Solo berkurang hampir 70% dari tahun 2017 dari semula 359,55 hektar pada 2017 menjadi 118 hektar pada 2021.
5. **96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran:** dengan jumlah score 1.709 diambil dari 560 responden, 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

BERSAMA
INDONESIA
MAJU

PRABOWO
GIBRAN
2024
BERSAMA INDONESIA MAJU

@prabowo

@gibran_rakabuming